

Analisis Kondisi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi

Junaidi; Zulfanetti; Hardiani

ABSTRAK

Analisis ini bertujuan untuk mendapatkan kondisi ketenaga kerjaan di Provinsi Jambi yang mencakup kondisi umum ketenagakerjaan dan karakteristik penduduk bekerja. Hasil analisis diharapkan dapat bermanfaat untuk (1) Sebagai pengembangan ilmu khususnya ilmu ekonomi pembangunan yang lebih aplikatif, yang berhubungan dengan tenaga kerja; (2) Bagi pengambil kebijakan, diharapkan dapat memberikan bantuan untuk perumusan kebijakan guna mempercepat pembangunan di Provinsi Jambi. Data yang digunakan data sekunder meliputi jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, PDRB dan data pendukung lainnya. Untuk menganalisis kondisi ketenagakerjaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan ukuran-ukuran ketenagakerjaan. Hasil analisis menemukan: 1) Mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian dan pada status usaha sektor informal, dengan pendidikan umumnya SMP ke bawah dan jam kerja lebih dari 35 jam seminggu; 2) Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi adalah sebesar 66,74 persen pertahun dengan rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,66 persen pertahun.

Kata kunci: Angkatan Kerja, Pengangguran, Penduduk Bekerja

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dengan menitik beratkan pada pertumbuhan yang tinggi merupakan prioritas utama. Ini dilakukan untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur antara lain melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah. Dampak pembangunan nasional mempunyai kaitan erat atas pembangunan daerah, sebab daerah merupakan satu kesatuan bagian integral dari negara kesatuan Indonesia.

Menurut Soeparmoko (2002) Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-

sumberdaya yang ada, dengan menjalin pola-pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak swasta guna penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah bersangkutan.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, sangat ditentukan oleh kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlandaskan pada upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja secara optimal dari segi jumlah, produktivitas dan efisien. Dalam penentuan kebijakan, haruslah memperhitungkan kondisi internal maupun perkembangan eksternal. Perbedaan kondisi internal dan eksternal hanyalah pada jangkauan wilayah, dimana kondisi internal meliputi wilayah daerah/regional, sedangkan kondisi eksternal meliputi wilayah nasional. Pembangunan ekonomi daerah melibatkan multisektor dan pelaku pembangunan, sehingga diperlukan kerjasama dan koordinasi diantara semua pihak yang berkepentingan.

Selain hal tersebut diatas ketersediaan tenaga juga kerja sangat di butuhkan dalam menopang pembangunan, dengan ketersediaan tenaga kerja yang memadai maka rencana pembangunan lebih cepat terlaksana dengan cepat. Tenaga kerja merupakan sumberdaya yang paling penting dalam proses pembangunan ini, karna dengan faktor produksi tenaga kerja yang melimpah maka kegiatan ekonomi akan lebih cepat berkembang dan mampu bersaing sehingga memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. demikian juga sebaliknya tanpa adanya tenaga kerja yang memadai maka aktifitas ekonomi akan terhambat sehingga pertumbuhan ekonomi juga melambat.

Solow (1956) yang mengintrodusir pentingnya faktor tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi. Solow mengkritik formulasi Harold-Domar dari kelompok Keynesian yang hanya menggunakan pendekatan akumulasi modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Disebutkan bahwa teori pertumbuhan Solow mematahkan formulasi Harold-Domar berdasarkan pendekatan *Diminishing Return to Individual Factor of Production* (Debraj, 1998). Dengan asumsi pertumbuhan tenaga kerja ditentukan secara eksogen dalam pertumbuhan ekonomi, Solow menjabarkan bahwa ketika stok modal tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dari pertumbuhan tenaga kerja, maka jumlah penambahan modal yang diciptakan oleh

setiap tenaga kerja akan meningkat. Oleh karena penambahan modal ini digunakan oleh setiap tenaga kerja, maka *marginal product of capital* akan menurun.

Menurut Gray (1992), tujuan penciptaan kesempatan kerja berkaitan erat dengan pertimbangan pemerataan pendapatan, mengingat bagian terbesar kelompok penduduk yang tergolong penganggur sekaligus merupakan golongan yang berpenghasilan rendah. Dan terdapat golongan penganggur terdidik yang hidup dari bantuan keluarga sambil menunggu kesempatan kerja dengan tingkat upah yang memenuhi harapannya, biasanya kesempatan kerja di sektor pemerintah.

Manurung (2001) menyatakan bahwa pada negara berkembang, Tenaga kerja (KL) masih merupakan faktor produksi yang sangat dominan. Penambahan tenaga kerja umumnya sangat berpengaruh terhadap peningkatan output. Yang menjadi persoalan adalah sampai berapa banyak penambahan tenaga kerja yang akan meningkatkan output. Hal ini tergantung dari seberapa cepat terjadinya *The Law Diminishing Return (TDLR)*, sedangkan cepat lambatnya proses TDLR sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan keterkaitan dengan kemajuan teknologi (T) produksi. Selama sinergi antara TK dan teknologi maka penambahan TK akan memacu pertumbuhan ekonomi, dengan demikian dapat dikatakan pada saat terjadi pertumbuhan ekonomi disisi lain juga akan terjadi penyerapan tenaga kerja.

Selanjutnya besarnya jumlah angkatan yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin banyak lapangan kerja akan meningkatkan total produksi di suatu wilayah. Yang merupakan jembatan utama yang mengaitkan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), sekitar dua pertiga penduduk Provinsi Jambi termasuk dalam angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan selama periode 2007-2009 dari 65,2 persen menjadi 66,7 persen. Melihat terjadinya pergerakan peningkatan partisipasi angkatan kerja, maka perlu diketahui bagaimana kondisi tenaga kerja yang ada di Provinsi Jambi saat ini, baik yang mencakup jumlah persediaan tenaga kerja, kebutuhan tenaga kerja dan kesempatan kerja yang ada. Diharapkan dengan teridentifikasi kondisi ketenaga kerjaan akan mempermudah pemerintah Provinsi Jambi dalam menentukan perencanaan dalam mempercepat pembangunan yang berbasis dengan

basis pada penciptaan lapangan pekerjaan dan merencanakan pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

II. METODE ANALISIS

Data yang dipergunakan dalam analisis ini adalah data sekunder yang meliputi jumlah penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, PDRB dan data pendukung lainnya. Data dikumpulkan selama periode tahun 2008 sampai 2012. Kondisi ketenagakerjaan dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan ukuran-ukuran/rasio ketenagakerjaan yang mencakup jumlah Tenaga kerja, TPAK, Kesempatan Kerja dan Pengangguran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Umum Ketenaga Kerjaan di Provinsi Jambi

Mencermati jumlah kepadatan penduduk dari tahun 2008-2012 mengalami peningkatan secara kontinu dan cukup tinggi. Terlihat pada tabel diatas bahwa pada tahun 2008 jumlah kepadatan penduduk di Provinsi Jambi adalah 52,18 jiwa/km, mengalami peningkatan sebesar 23,8 persen sehingga menjadi 64,65 jiwa/km. Tingkat kepadatan penduduk ini juga tidak merata, yang umumnya terjadi pada daerah perkotaan dan dipusat-pusat perekonomian.

Tabel 1 Jumlah penduduk, Angkatan kerja, Bukan angkatan kerja dan Kepadatan penduduk di Provinsi Jambi tahun 2008-2012 (Jiwa/Orang)

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Jumlah Penduduk	2.788.269	2.834.164	3.092.265	3.169.814	3.242.814
2	Jumlah Penduduk (laki laki)	1.422.235	1.444.783	1.581.110	1.623.920	1.655.059
3	Jumlah Penduduk (perempuan)	1.366.034	1.389.381	1.511.155	1.545.894	1.587.755
4	Angkatan Kerja	1.290.854	1.334.496	1.545.683	1.495.167	1.551.012
5	Bukan Angkatan Kerja	666.556	667.861	804.059	714.336	789.768
6	Kepadatan Penduduk	52,18	56,50	61,65	63,19	64.65

Sumber : BPS Provinsi Jambi

Berdasarkan tingkat pertumbuhannya secara rata-rata pertumbuhan jumlah bukan angkatan kerja mengalami pertumbuhan sebesar 5 persen, sedangkan untuk jumlah angkatan kerja sebesar 4,92 persem. Melihat tingginya pertumbuhan yang terjadi maka perlu penanganan khusus sehingga peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3.2 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Seiring dengan kemajuan ekonomi di Provinsi Jambi terlihat mulai adanya pergeseran lapangan pekerjaan utama. Seperti yang terjadi pada sektor pertanian, konstruksi, pengangkutan beralih pada sektor perdagangan, industri pengolahan, lembaga keuangan & jasa perusahaan serta sektor jasa. Melihat pergeseran pada lapangan pekerjaan utama tersebut dapat tarik kesimpulan bahwa adanya perbaikan secara kualitas baik dari skil dan SDM sehingga mampu beralih pada profesi yang lebih baik.

Tabel 2 Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, 2008-2012 (ribu orang)

Jenis Lapangan pekerjaan utama	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	688.541	700.340	670.841	851.138	783.501
Pertambangan dan penggalian	23.330	21.713	22.727	14.004	27846
Industri pengolahan	44.892	45.176	34.821	36.844	47.402
Listrik, gas dan air minum	1.262	3.225	5.268	2.613	2.812
Konstruksi	39.891	56.385	46.063	33.617	62.169
Perdagangan	180.281	201.979	211.946	262.054	229.912
Pengangkutan	65.967	61.584	63.675	54.988	44.797
Lembaga keu. & jasa perusahaan	7.014	6.778	13.526	16.737	22.622
Jasa	131.495	175.340	221.839	196.663	606.627

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Selain meningkatkan SDM yang ada juga terjadi indikasi pergeseran struktur perekonomian, yang ditandai dengan pergeseran jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor primer mulai berpindah pada sektor sekunder. Melihat pola pergeseran struktur perekonomian dan kebutuhan tenaga kerja yang terjadi, maka hal yang perlu dipersiapkan adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi.

Tabel 3 Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama, 2008-2012 (ribu orang)

Jenis Lapangan pekerjaan utama	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	58,22	55,04	51,97	57,95	42,87
Pertambangan dan penggalian	1,97	1,71	1,76	0,95	1,52
Industri pengolahan	3,80	3,55	2,70	2,51	2,59
Listrik, gas dan air minum	0,11	0,25	0,41	0,18	0,15
Konstruksi	3,37	4,43	3,57	2,29	3,40
Perdagangan	15,24	15,87	16,42	17,84	12,58
Pengangkutan	5,58	4,84	4,93	3,74	2,45
Lembaga keu. & jasa perusahaan	0,59	0,53	1,05	1,14	1,24
Jasa	11,12	13,78	17,19	13,39	33,19

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Tabel 3 menggambarkan secara jelas bahwa proporsi adanya pergerakan baik kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pergerakan yang terjadi merupakan imbas dari peta kebutuhan tenaga kerja atau lowongan pekerjaan yang ada di Provinsi Jambi.

3.3 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Berdasarkan klasifikasi pekerjaannya maka status pekerjaan utama dapat dikelompokkan menjadi dua status pekerjaan utama yaitu formal dan informal. Pekerja formal merupakan pekerjaan yang memencakup kategori berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh karyawan. Sementara untuk jenis pekerjaan informal terdiri dari buruh, pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Status pekerjaan utama di Provinsi Jambi masih didominasi pada sektor informal (dengan jumlah tenaga kerja sebesar 59,72 persen). Masih tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja pada sektor ini sebagai dampak dari masih rendahnya tingkat pendidikan. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan yang rendah sektor informal menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan relatif non skill sehingga hampir diseluruh kalangan masyarakat dapat memasukinya.

Dalam satu tahun terakhir berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa, pekerja informal secara absolut berkurang sebanyak 28,2 ribu

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2014

orang begitu pula secara persentase pekerja informal berkurang dari 60,54 persen pada tahun 2013 menjadi 59,72 persen pada tahun 2014. Penurunan pekerja informal secara absolut ini berasal dari komponen pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas dinonpertanian dan pekerja keluarga/tak dibayar, seperti yang terlampir pada tabel berikut.

Tabel 4 Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut status pekerjaan utama, 2012-2014 (ribu orang)

Status pekerjaan utama	2011	2013	2014
Berusaha sendiri	287.78	283.68	338.26
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	230.73	240.99	241.34
Berusaha dibantu buruh tetap	68.25	72.63	75.12
Buruh/karyawan	558.59	541.63	541.65
Pekerja bebas dipertanian	68.55	76.33	53.90
Pekerja bebas dinon pertanian	32.98	48.30	24.35
Pekerja keluarga/tak dibayar	274.54	293.17	256.44

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

3.4 Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan

Tenaga kerja di Provinsi Jambi masih didominasi tenaga kerja yang berpendidikan rendah yaitu (SMP Kebawah), ini ditunjukkan dari dari jumlah tenaga kerja yang paling banyak bekerja pada kelompok tersebut. Namun, jika dilihat dari pergerakan jumlah tenaga kerja yang bekerja menurut jenjang pendidikan tenaga kerja yang berpendidikan strata satu dan sekolah menengah atas mengalami peningkatan yang cukup besar. Peningkatan jumlah tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan tersebut merupakan gambaran dari peningkatan sumberdaya manusia kita, selain itu juga menggambarkan standar dari jumlah kesempatan kerja yang ada.

Seiring dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan terlihat adanya penurunan tenaga kerja pada kelompok tenaga kerja yang berpendidikan rendah hal ini disebabkan selain karena adanya regenerasi tenaga kerja yang ada dan kesempatan kerja yang tersedia. Jika dilihat tren pergerakannya maka kondisi ini akan terus berlanjut untuk tahun tahun yang akan datang. Dari analisa dapat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2014

ditarik kesimpulan bahwa kebutuhan pada pasar tenaga kerja sudah mulai beralih dan berorientasi pada sumberdaya atau skill dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5 Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2008-2012 (ribu orang)

Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan	2008	2009	2010	2011	2012
SD Kebawah	637.897	644.049	1.025.039	714.728	593.696
Sekolah Menengah Pertama	250.492	244.856	295.164	258.190	270.381
Sekolah Menengah Atas/SMK	257.574	269.234	336.971	319.527	317.709
Diploma I/II/III/ Universitas	78.520	92.453	105.231	142.553	141.938

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Dilihat dari jumlah proporsinya penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi masih didominasi penduduk pada kelompok pendidikan Sekolah Dasar kebawah dengan rata rata proporsinya lebih dari 50 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada. Sementara penduduk yang bekerja dengan tingkan pendidikan Diploma keatas menempati urutan terendah dari jumlah proporsi tenaga kerja yang ada. Kondisi semacam ini menggambarkan bahwa nilai daya saing tenaga kerjanya masih rendah. Seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Proporsi penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan 2008-2012 (ribu orang)

Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan	2008	2009	2010	2011	2012
SD Kebawah	52,10	51,50	58,16	49,81	44,85
Sekolah Menengah Pertama	20,46	19,58	16,75	17,99	20,43
Sekolah Menengah Atas/SMK	21,04	21,53	19,12	22,27	24,00
Diploma I/II/III/ Universitas	6,41	7,39	5,97	9,93	10,72

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

3.5 Penduduk Yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja

Secara umum, komposisi penduduk yang bekerja menurut jumlah jam kerja dalam satu minggu secara umum masih lebih dari 35 jam perminggu, berdasarkan data yang ada lebih dari 55 persen. Seperti yang terlihat pada Tabel 7, mayoritas jumlah penduduk yang bekerja lebih dari 35 jam perminggu. sementara penduduk

yang bekerja diantara 1-35 jam perminggu menempati urutan kedua. Terlihat juga berdasarkan data yang ada, terlihat adanya pergerakan yang cukup signifikan pada jumlah pekerja berdasarkan jam kerja perminggu. Perubahan dan pergerakan jam kerja yang terjadi merupakan akibat dari perubahan jam kerja pada tenaga kerja yang bekerja di sektor informal, karena pada sektor ini tenaga kerjanya relatif tidak tetap. Kelompok tenaga kerja ini dianggap sebagai tenaga kerja yang bekerja penuh (full time worker) yang merupakan tenaga kerja yang bekerja lebih dari 35 jam perminggu.

Sementara kelompok pekerja yang bekerja tidak penuh adalah kelompok tenaga kerja yang jumlah jam kerjanya kurang dari 35 jam perminggu. Pada kelompok jam kerja ini pada umumnya adalah pekerja yang bekerja pada paruh waktu atau serabutan (buruh) atau disektor perkebunan pada umumnya tidak memerlukan pekerjaan yang memakan waktu lama.

Tabel 7 Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja menurut jumlah jam kerja per minggu 2008 - 2012 (ribu orang)

Jumlah jam kerja per minggu	2008	2009	2010	2011	2012
1 – 7	57.462	65.038	78.999	14.028	94.151
15 - 24	422.364	443.697	531.496	658.999	574.162
35 +	775.398	730.326	818.620	765.324	728.477

Sumber: BPS Provinsi Jambi

Sementara penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja antara 1 – 7 jam perminggu hanya sebanyak 94.151 orang, yang pada umumnya penduduk yang bekerja dengan jumlah jam tersebut berprofesi sebagai pemilik modal, pengusaha, dan para pekerja profesional.

3.6 TPAK dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat partisipasi kerja (TPAK) dapat diartikan sebagai perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk pada usia kerja (penduduk usia kerja adalah penduduk yang ber usia antara 15-64 tahun keatas yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. Salah satu indikator yang bisa mengukur besarnya penyerapan tenaga kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja). TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara

ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dengan nilai maksimum 100, semakin tinggi nilai TPAK berarti semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam perekonomian.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran disini merupakan angkatan kerja yang belum atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terjadi karena jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar daripada permintaan tenaga kerja. Pengangguran merupakan salah satu masalah (beban pemerintah) disatu sisi jumlah penduduk dari tahun ketahun terus bertambah, disisi lain peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk.

Terlihat pada tabel dibawah, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya sementara tingkat pengangguran terbuka cenderung mengalami penurunan. Pergerakan tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam ketersediaan lapangan kerja di Provinsi Jambi. Dari data yang ada, tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 67.68 persen dari total angkatan kerja. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja terendah terjadi pada tahun 2010 yang hanya sebesar 65.78 persen.

Tabel 8 Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dan Tingkat pengangguran terbuka (TPT) penduduk usia 15 tahun ke atas, 2008-2012 (persen).

Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.95	66.65	65.78	67.67	67.68
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5.14	5.54	5.39	4.02	3.22

Sumber: BPS Provinsi Jambi (data diolah)

Sementara tingkat pengangguran terbuka tertinggi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 5.54 persen dan tingkat pengangguran terbuka terendah terjadi pada tahun 2012 yang hanya sebesar 3.22 persen. Meningkatnya pengangguran pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2014

tahun 2009 tersebut dipengaruhi oleh terjadinya krisis pada tahun tersebut sehingga memberikan guncangan pada semua sektor perekonomian yang pada akhirnya mengurangi pertumbuhan kesempatan kerja. Dengan berkurangnya kesempatan kerja yang ada dan diiringi dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja maka pengangguran otomatis akan tercipta.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mayoritas penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi bekerja pada sektor pertanian dan pada status usaha sektor informal, dengan pendidikan umumnya SMP ke bawah, dengan jam kerja lebih dari 35 jam perminggu
2. Rata-rata Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Jambi adalah sebesar 66,74 persen pertahun
3. Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,66 persen pertahun.

4.2 Saran

1. Dalam upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja di Provinsi Jambi maka pemerintah sangat perlu melakukan peningkatan kualitas sumberdaya dan skill khususnya pada tenaga kerja yang ada, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada penduduk yang ada di Provinsi Jambi.
2. Dalam upaya mencukupi atau meningkatkan kesesuaian antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dengan kesempatan kerja yang ada maka pemerintah perlu melakukan upaya pembukaan lapangan kerja lebih intensif baik dalam bentuk program pemerintah (pelatihan skill dan pemberian modal) maupun pembukaan lapangan kerja yang bersifat padat karya.

REFERENCES

1. BPS .2002-2012. Badan Pusat Statistik Propinsi Jambi. *Jambi Dalam Angka, Jambi*

2. Junaidi , Hardiani. (2009). *Dasar-Dasar Teori Ekonomi Kependudukan*. Jakarta. Hamada Prima
3. Junaidi, J. (2010). Model-Model Proyeksi Penduduk
4. Mudrajad, K. (2004). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Erlangga, Jakarta.
5. Prihanto. PH , Syaifuddin.(1996). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kesempatan Kerja di Propinsi Jambi*. Jurnal Manajemen dan Pembangunan. Edisi V. FE. UNJA. Jambi
6. Suryana, H. (2000). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
7. Sukirno, Sadono. (1985). *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, LPFE UI. Jakarta
8. Soeparmoko. (2002). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta
9. Siegel S. (1997). *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta
10. Todaro, M. (1997), *Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.